

No. 196 Juni 2022

BaKTI News

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



PEMBANGUNAN INKLUSIF

**LEBIH KENAL JENTIKNYA
LEBIH CEPAT CEGAH
MALARIANYA**

**STRANAS PPA DAN
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews**** Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews**** Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI**News**

Juni 2022

No. 196

- 1** Pembangunan Inklusif
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 7** Lebih kenal Jentiknya Lebih Cepat
Cegah Malaria
Oleh **INRIYANI TAKESAN**
- 11** Sekolah sebagai Pusat Informasi
Layanan Sosial untuk Anak
Oleh **YUSRI**
- 15** Curhat Guru di Pelosok: Anak dari
Keluarga Miskin Mungkin Akan
Tetap Miskin
Oleh **ADI SIMANJUNTAK**
- 18** Apa itu '*Information Overload*'
dan Kenapa Penting Dipahami
Pekerja
Oleh **KEVIN SEFTIAN**
- 21** Konseptualisasi Fasilitas UMKM
Oleh **AM. SALLATU**
- 25** Begini Urgensi Penguatan Tradisi
Bahari untuk Kelestarian Laut di
Indonesia Timur
Oleh **MAHMUD ICHI**
- 30** Stranas PPA dan Pencegahan
Perkawinan Anak
Oleh **AYU PUTU EKA NOVITA**
- 33** Noken Adat untuk Kesejahteraan
Masyarakat Adat di Tanah Papua
Oleh **ITA IBNU**
- 36** KLIK Baik, Menaklukkan Tantangan
Pelayanan Publik dengan Inovasi
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 40** Diskusi *Online Live* di
Instagram Story @infobakti
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Foto cover: **ADWIT B. PRAMONO/Yayasan BaKTI**



Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang memberi ruang, membuka akses, serta melibatkan atau mendorong partisipasi semua warga dan komponen bangsa. Semua warga diberi ruang dan didorong untuk terlibat dalam proses dan mendapatkan akses untuk memperoleh layanan, fasilitas publik, atau apapun yang disediakan oleh negara dan penyedia layanan publik yang lain.

Pembangunan inklusif menjadi perhatian global untuk menggantikan sistem pembangunan yang selama ini meminggirkan, bahkan memberi stigma buruk kepada berbagai kelompok sosial. Tidak sedikit kelompok sosial minoritas dan rentan yang dianggap dan dicap sebagai beban bagi pembangunan, sehingga tidak dilibatkan dalam proses-proses pembangunan, mengalami diskriminasi dan kekerasan.

Pembangunan itu sendiri menurut Joke Schrijvers (2000) adalah kekerasan. Tidak hanya dalam pelaksanaannya, tetapi juga paradigma dasar yang melandasinya. Paradigma pertumbuhan paling sering dikritik karena menimbulkan kekerasan dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu di dalam negara, terutama kelompok minoritas, rentan, dan miskin.



PEMBANGUNAN INKLUSIF

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**



Foto: Yusuf Ahmad/Dok. BASICS

Bahkan pada kasus-kasus tertentu, paradigma pertumbuhan memelihara kemiskinan dan melahirkan kelompok miskin baru.

Minoritas, Marginal & Rentan

Perempuan dan anak bukanlah minoritas dalam masyarakat, tetapi kedua kelompok tersebut menjadi kelompok marginal dan rentan dalam pembangunan yang tidak inklusif. Data-data statistik menunjukkan bahwa angka

kematian ibu, angka kematian anak, anak tengkes (*stunting*), anak kurang gizi dan gizi buruk, perkawinan anak, dan kekerasan merupakan sejumlah permasalahan yang menimpa perempuan dan anak. Walaupun jumlah perempuan berimbang dengan jumlah laki-laki, akan tetapi perempuan mempunyai peran terbatas karena berbagai faktor budaya dan struktural di dalam masyarakat dan bernegara yang terus terpelihara.



Orang difabel (*differently-abled people*) atau orang dengan kemampuan yang berbeda bisa disebut minoritas jika dilihat dari sisi jumlahnya di dalam masyarakat. Hanya sedikit pembangunan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan orang difabel, bahkan dengan cara yang tidak manusiawi. Orang difabel masih mengalami stigma dan dianggap sebagai beban pembangunan.

Diskriminasi dan kekerasan berlapis sering dialami oleh perempuan, anak, dan orang difabel. Jika seorang perempuan dewasa mengalami kekerasan dan diskriminasi maka dia hanya mengalaminya sebagai perempuan. Demikian juga jika seorang anak laki-laki yang mengalami kekerasan dan diskriminasi, maka dia mengalaminya sebagai anak. Namun berbeda jika seorang perempuan difabel atau seorang anak perempuan difabel yang mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Perempuan dan anak bukanlah minoritas dalam masyarakat, tetapi mereka cenderung termarginalkan dan rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan secara fisik maupun seksual.

Foto: Frans Gosali/Yayasan BaKTI

Perempuan difabel mengalami diskriminasi dan kekerasan sebagai perempuan dan sebagai orang difabel. Sedangkan seorang anak perempuan difabel mengalami diskriminasi dan kekerasan karena tiga status yang disandangnya, yakni sebagai anak, sebagai perempuan, dan orang difabel. Inilah yang disebut diskriminasi dan kekerasan bertingkat dan berlapis. Diskriminasi dan kekerasan masih akan bertambah, jika perempuan atau anak perempuan tersebut berasal dari suku minoritas atau penganut agama/keyakinan minoritas, apalagi yang tidak diakui negara.

Suku minoritas, minoritas agama atau kepercayaan minoritas (yang tidak diakui negara), dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan



transgender) adalah kelompok minoritas dalam masyarakat dan negara. Selama ini mereka mengalami diskriminasi dan kekerasan, karena berbagai stigma dan minimnya perlindungan dari negara. Suku minoritas, yang dulu disebut suku terasing, adalah kelompok yang menyandang status sebagai minoritas sekaligus sebagai marginal dan rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Minoritas agama sering mengalami stigma sebagai penganut agama nenek moyang, yang disebutnya sebagai syirik.

Ruang untuk Kesetaraan

Diskriminasi (pembedaan) terhadap orang atau kelompok ditengarai menjadi penyebab terjadinya kekerasan, baik fisik maupun nonfisik. Proses-proses pembangunan ikut melegitimasi dan memperburuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas

dan marginal, karena ada jarak yang diciptakan dalam pembangunan, sejak dari perencanaan hingga implementasi.

Suara-suara minoritas dan pinggirannya tidak selalu didengar dan diakomodasi dalam proses pembangunan. Apalagi sebagian kelompok minoritas tersebut telah mendapat label sebagai sesat, laknat, syirik, dan tidak beradab, yang kemudian berujung pada upaya untuk menghambat dan mencegah masuknya kebutuhan dan kepentingan mereka di dalam perencanaan, kebijakan, dan alokasi sumber daya pembangunan.

Pelabelan terhadap kelompok minoritas dan marginal tidak hanya menyebabkan kelompok-kelompok tersebut semakin tersingkir, tetapi juga melegitimasi dan membenarkan perlakuan kekerasan terhadap mereka. Diskriminasi dan kekerasan atas nama agama dan moral dilakukan oleh kelompok mayoritas dan memiliki akses



Foto: Yusuf Ahmad/Dok. KOMPAK

Hanya sedikit pembangunan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan orang difabel, bahkan dengan cara yang tidak manusiawi. Orang difabel masih mengalami stigma dan dianggap sebagai beban pembangunan.

pada ruang-ruang pembentukan kebijakan dan sumber daya sehingga semakin meminggirkan kelompok minoritas.

Pada berbagai peristiwa, negara seakan tidak berdaya dan melakukan pembiaran terjadinya diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok warga negara terhadap warga negara yang lain.

Sejak tahun 1990-an, banyak pihak mulai mendorong perubahan paradigma dan praktik pembangunan yang mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan warga negara. Pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan dan kemajuan, tetapi juga kesetaraan dan kebebasan, sebagai bagian dari kemanusiaan. Pembangunan harus menyediakan ruang untuk partisipasi dan akses yang memadai bagi mereka yang selama ini disingkirkan dalam proses pembangunan.

Menuju Masyarakat Inklusif

Yayasan BaKTI melalui Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) berupaya untuk berkontribusi pada pengurangan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas, menghubungkan dan membuka

akses layanan pemerintah, mendorong dan memperkuat keberdayaan masyarakat untuk mengadvokasi hak-haknya sebagai warga negara. Program INKLUSI adalah sebuah program pembangunan yang menggunakan pendekatan pada kesetaraan, kesamaan, pemberdayaan, dan akses yang sama pada layanan negara dan sumber-sumber pembangunan. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan, di mana proses dan hasilnya memandu jalan menuju masyarakat yang inklusif.

Program INKLUSI-BaKTI baru dimulai pada April 2022 dan akan dilaksanakan di Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja, Kota Kendari, Kabupaten Kupang, Lombok Timur, dan Kota Ambon. Di wilayah-wilayah tersebut, Yayasan BaKTI mempunyai mitra yang cukup mumpuni dan berpengalaman dalam membangun kerja sama dengan *stakeholders* kunci, yakni eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, media massa, dan masyarakat melalui kelompok konstituen.

Sebelumnya, Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) fokus pada pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong dan menguatkan perempuan untuk mengakses layanan yang disediakan pemerintah. Perempuan diberdayakan sehingga dapat bersuara di ruang-ruang publik untuk memengaruhi proses dan mekanisme secara demokratis dalam mengubah kebijakan yang responsif gender.

Program INKLUSI-BaKTI tetap menjadikan pengurangan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu fokus. Pengalaman pada Program MAMPU melalui pengorganisasian perempuan di dalam Kelompok Konstituen, di mana organisasi tersebut tidak hanya berhasil mendampingi perempuan korban kekerasan,

tetapi juga menjangkau kelompok-kelompok minoritas dan marginal yang lebih luas, seperti orang difabel, anak, lanjut usia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Sebagai program yang mengenalkan dan mengusung paradigma dan praktik pembangunan inklusif untuk melahirkan masyarakat inklusif, maka Program INKLUSI-BaKTI diperluas untuk menjangkau kelompok minoritas dan marginal yang lebih luas, yakni disabilitas, suku minoritas, penganut agama dan kepercayaan minoritas dan LGBT. Mereka adalah warga negara yang harus memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka karena pandangan hidup, keyakinan, dan orientasi seksual, yang mereka anut, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum.

Sudah saatnya, ideologi dan paradigma pembangunan diletakkan, direncanakan, dan diimplementasikan untuk membebaskan dan memanusiakan manusia. Dalam kerangka itu, semua warga negara, terutama mereka yang selama ini merupakan kelompok marginal, miskin, dan minoritas harus diberi kesempatan, ruang, dan afirmasi untuk terlibat dalam proses-proses pembangunan.

Sementara diskriminasi terhadap perempuan, anak, disabilitas, suku minoritas, penganut agama dan kepercayaan minoritas dan LGBT, adalah faktor yang selama ini membuat mereka terpuruk dengan berbagai masalah yang terpelihara. Penghapusan diskriminasi menjadi suatu keniscayaan, karena kehidupan yang berkeadilan untuk semua manusia bisa dicapai tanpa diskriminasi. Menurut Nurcholish Madjid, salah satu cendekiawan muslim dan pemikir kebangsaan, bahwa non diskriminasi adalah persyaratan bagi adanya keadilan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-Yayasan BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



LEBIH KENAL JENTIKNYA LEBIH CEPAT CEGAH MALARIANYA

Oleh INRIYANI TAKESAN



alaria merupakan salah satu penyakit menular yang berbasis lingkungan. Penularannya adalah melalui gigitan nyamuk *Anopheles*. Tentu saja penyakit ini menjadi sesuatu hal yang cukup horor terutama bagi para pelaku perjalanan ke wilayah yang dinyatakan masih endemis malaria. Pada tahun 2021, ditemukan 9.419 kasus malaria di Nusa Tenggara Timur dengan 95% kasus di Pulau Sumba. Sementara sejak Januari hingga bulan Maret 2022 ini sudah sekitar tiga ribu kasus malaria yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).

Entomologi merupakan cabang ilmu zoologi yang mempelajari tentang serangga serta hubungannya dengan manusia, lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Pada pelatihan ini peserta mempelajari tentang nyamuk *Anopheles*.

Nyamuk ini melepaskan telurnya di genangan air, kemudian membentuk larva atau jentik, pupa dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Siklus hidup telur sampai menjadi pupa terjadi di dalam air dan setelah menjadi nyamuk dewasa, hidupnya di daratan.

Seseorang dapat terkena malaria apabila digigit oleh nyamuk *Anopheles* yang sudah pernah menggigit (menghisap darah) penderita malaria sebelumnya. Parasit yang dibawa nyamuk dari penderita malaria kemudian masuk ke dalam tubuh orang yang baru digigit tadi dan ikut terbawa aliran darah sampai ke hati dan bertambah banyak, kemudian menyebar sampai ke sel darah merah.

Apabila ada nyamuk *Anopheles* lain yang datang menggigit saat itu maka kemungkinan penularan malaria akan terus berlanjut. Untuk itulah diperlukan pengobatan yang sesuai standar program sesuai jenis parasitnya agar penderita malaria dapat sembuh dan tidak lagi terjadi penularan atau kemungkinan kambuh penyakit malaria.

Untuk memutus rantai penularan, selain dengan pengobatan yang tuntas pada penderita malaria, tentu saja perlu ada tindakan pencegahan dan pengendalian nyamuk pembawa parasit malaria itu dalam lingkungan masyarakat yang digerakan oleh petugas puskesmas.

Pada bulan September tahun 2021 yang lalu Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Loka Litbangkes Waikabubak menyelenggarakan Pelatihan Entomologi Angkatan I di Kabupaten Sumba Barat. Peserta pelatihan ini adalah para sanitarian dan pengelola malaria tingkat puskesmas dari Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, didampingi oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumba Barat, pengelola malaria Kabupaten Sumba Barat dan pengelola malaria Kabupaten Sumba Barat Daya.

Selama satu minggu peserta dibimbing oleh para fasilitator dari Loka Litbangkes Waikabubak, termasuk *sharing* pengetahuan tentang identifikasi *Anopheles*, pengendalian vektor hingga pengenalan dengan aplikasi *Epi Collect* untuk membantu pemetaan wilayah yang



masih ditemukan jentik *Anopheles* dan untuk menyimpan data-data penting saat turun ke lapangan contohnya suhu, pH, salinitas, tanaman sekitar, kecepatan air dan titik koordinat. Tidak kalah menarik Bapak Paulus dan Bapak Yuliandri dari Program Pencegahan Penyakit Tular Vektor Zoonotik, Kemenkes juga menyampaikan materi terkait kebijakan malaria dan surveilans vektor malaria.

Surveilans adalah upaya yang dilakukan secara sistematis secara terus menerus mulai dari pengumpulan data, analisis data, melihat kecenderungan penyakit, memprediksi kemunculan KLB (kejadian luar biasa), melihat faktor-faktor yang memengaruhi penularan suatu penyakit. Data-data ini yang kemudian dipakai dalam perencanaan hingga evaluasi program.

Vektor merupakan binatang pembawa penyakit yang dapat disebabkan oleh parasit atau dapat dikatakan binatang yang menularkan penyakit karena ada parasit penyebab penyakit yang ada pada binatang tersebut. Nyamuk *Anopheles* merupakan vektor malaria yang kemudian dalam surveilans vektor malaria, terus menerus dipantau hingga dapat dipahami dinamika penularan dan pengendalian malaria di suatu wilayah tertentu.

Setelah penyampaian materi, peserta dibimbing untuk mampu mengoperasikan mikroskop. Setiap peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan mikroskop, mempelajari jentik nyamuk dan nyamuk dewasa yang sudah disediakan. Membedakan berbagai spesies nyamuk *Anopheles* termasuk membedakan nyamuk jantan dan betina.

Selanjutnya, peserta pelatihan yang sudah diperkenalkan dengan jentik dan nyamuk dewasa dibimbing untuk praktik lapangan, mencari jentik di sungai dan nyamuk dewasa di perumahan warga. Peserta bersama fasilitator dan panitia berangkat ke lokasi praktik yaitu di wilayah kerja Puskesmas Lahihuruk, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat. Lokasi yang dipilih adalah sungai dan perumahan warga di dekat sungai, ada sawah dan tidak jauh dari laut.

Tiba di lokasi, peserta dibekali dengan peralatan untuk menciduk jentik, kemudian ada pembentukan kelompok untuk menangkap nyamuk dewasa pada malam hari dengan metode umpan orang luar dan orang dalam serta penangkapan nyamuk di sekitar kandang kerbau. Kelompok 'umpan orang luar' mendapat tugas untuk menangkap nyamuk di luar rumah, misalnya dengan duduk di teras rumah.



- 1 Peserta sedang mempelajari anatomi nyamuk anopheles
- 2 Pak Hanani dari Loka Litbangkes Waikabubak sedang menyampaikan pelatihan
- 3 & 4 Pencidukan jentik nyamuk

Foto: **Dok. Inriyani Takesan**

Sedangkan kelompok ‘umpan orang dalam’ ditugaskan untuk menangkap nyamuk di dalam rumah. Hasil tangkapan terbanyak adalah dari sekitar kandang.

Jentik dan nyamuk yang ditangkap dan disimpan pada wadah yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dibawa kembali ke tempat pelatihan untuk dipelajari lebih lanjut hingga dibedah dengan bantuan mikroskop. Beberapa jentik nyamuk pun dipelihara hingga menjadi dewasa untuk kemudian dipelajari.

Peserta terlihat sangat senang bisa mendapatkan ilmu tentang entomologi sekaligus praktik untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari secara langsung di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi motivasi agar para pejuang eliminasi malaria di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya ini menerapkan ilmu entomologi sampai ke wilayah kerja puskesmas masing-masing.

Mencari dan menemukan jentik serta nyamuk *Anopheles* dewasa atau lebih dikenal dengan Survei Reseptifitas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan di desa maupun kelurahan yang memiliki sumber atau genangan air, tempat perindukan nyamuk.

Suatu wilayah dinyatakan reseptif ketika ditemukan ada jentik maupun nyamuk *Anopheles* dewasa. Setelah mengetahui lokasi yang reseptif, intervensi terhadap lingkungan di lokasi tersebut perlu segera dilakukan yaitu dengan melepas ikan pemakan jentik atau modifikasi lingkungan seperti penimbunan genangan air, membersihkan tanaman air yang mengapung, membuat saluran yang menghubungkan air payau dan air laut atau menaburkan larvasida. Selanjutnya, pencarian kasus positif malaria juga perlu untuk digencarkan misalnya melalui survei darah massal atau kunjungan rumah oleh JMD (juru malaria desa) di wilayah yang reseptif tersebut.

Diharapkan, dengan pengenalan yang semakin tajam tentang nyamuk *Anopheles* mulai dari siklus hidup serta cara menciduk dan menangkapnya maka perjuangan untuk ‘Sumba Bebas Malaria’ menjadi lebih mantap dan tepat sasaran.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah ME Junior pada GF ATM-Komponen Malaria Provinsi NTT dan dapat dihubungi melalui email inriyanitakesan@gmail.com



SEKOLAH SEBAGAI PUSAT INFORMASI LAYANAN SOSIAL UNTUK ANAK

Oleh **YUSRI**

Berbagai layanan sosial telah disediakan oleh pemerintah untuk membantu anak dalam pemenuhan hak dasarnya baik itu dalam aspek hak mendapatkan pendidikan dasar, perlindungan, kesehatan, dan beberapa hak dasar lainnya.

Layanan-layanan sosial tersebut diwadahi oleh beberapa dinas di setiap kabupaten/kota baik dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas kesehatan, dan dinas terkait lainnya. Selama Pandemi COVID-19, terdapat berbagai kasus



Foto: Dok. Yusri

yang dialami oleh anak, seperti korban kekerasan, putus sekolah, anak yang dipekerjakan, gangguan atau tekanan psikologis, dan beberapa kasus lainnya. Namun sayangnya, beberapa orang tua memilih untuk tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak penyedia layanan, padahal ketika orang tua melaporkan kasus tersebut, para penyedia layanan akan memberikan pendampingan kepada anak dan keluarga untuk mendapatkan hak dasarnya tersebut.

Terdapat kecenderungan mengapa orang tua dan anak memilih tidak melaporkan kasus tersebut kepada lembaga penyedia layanan sosial terkait. Salah satunya yakni mereka kurang memiliki informasi di mana

mereka dapat memperoleh pendampingan ketika anak membutuhkan layanan sosial ataupun pendampingan atau sejenisnya. Selain itu, beberapa orang tua mengetahui bahwa terdapat lembaga penyedia layanan sosial, namun karena akses yang terlalu jauh sehingga mereka memilih untuk tidak melaporkan kasus tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang penting untuk memberdayakan peran sekolah sebagai perantara antara keluarga dan penyedia layanan sosial. Selain itu sekolah juga diharapkan dapat memberikan layanan dasar ketika anak membutuhkan pendampingan khususnya terkait permasalahan psikologis.

Yayasan Indonesia Mengabdi melalui dukungan UNICEF Indonesia dan *Japan Government (From the people of Japan)* telah mengembangkan sebuah mekanisme penanganan dan rujukan kasus anak berbasis sekolah. Mekanisme ini fokus memberdayakan sekolah sebagai pusat informasi layanan sosial yang tersedia yang dapat diakses oleh anak. Selain itu, pada mekanisme ini, beberapa guru dilatih untuk menjadi guru terlatih yang mempunyai beberapa tugas seperti menerima laporan dari anak dan keluarga, melakukan asesmen kasus anak secara umum mengenai jenis kasus dan potensi penyebab, melakukan asesmen psikologis ketika ketika permasalahan anak mengenai masalah psikologis, memberikan penanganan awal kepada anak yang bersifat non-spesialis, mendampingi dan melakukan rujukan kasus anak kepada layanan sosial yang terkait.

Terdapat beberapa tahap mekanisme penanganan dan rujukan kasus anak berbasis sekolah, di antaranya sebagai berikut.



**TAHAP PERTAMA:
Menerima Laporan**

Laporan kasus anak yang masuk di sekolah dapat disampaikan oleh pihak keluarga/orang tua, pihak anak itu sendiri, dan warga sekolah. Segala laporan yang masuk selanjutnya akan didokumentasikan oleh guru/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menangani bagian tersebut.

**TAHAP KEDUA:
Asesmen Tahap Pertama**

Setelah laporan masuk, anak tersebut akan diasesmen menggunakan Instrumen Potensi Penyebab Kasus untuk mengetahui jenis kasus yang dialami oleh anak dan potensi penyebab dari kasus tersebut. Kasus yang dialami oleh anak pada tahap ini akan diidentifikasi apakah masuk masalah hukum, kesehatan, administratif, atau masalah psikologis.

**TAHAP KETIGA:
Rujukan ke Penyedia Layanan Sosial**

Setelah asesmen tahap pertama, anak-anak yang mengalami kasus di bidang hukum, kesehatan, dan administratif akan langsung dirujuk kepada lembaga penyedia layanan sosial baik itu Dinas Sosial, PKSAI, UPTD PPA, puskesmas, ataupun polsek.

**TAHAP KEEMPAT:
Asesmen Tahap Kedua**

Ketika kasus yang dialami oleh anak terkait masalah psikologis, maka akan dilakukan asesmen tahap kedua menggunakan instrumen SDQ (*Strength and Difficulties Questionnaire*).

**TAHAP KELIMA:
Perencanaan dan Pelaksanaan Intervensi**

Hasil dari penerapan instrumen SDQ akan mengkategorikan masalah psikologis yang dialami oleh anak ke dalam 3 tingkatan (normal/rendah, sedang, dan tinggi). Anak yang berada pada kategori normal/rendah bisa saja langsung diarahkan ke tahap terminasi (penutupan kasus) karena dianggap masalah yang dialami oleh anak tidak membutuhkan intervensi dari sekolah. Namun meskipun berada pada kategori normal/rendah, ketika guru merasa anak tersebut membutuhkan intervensi, maka anak kasus anak tersebut akan masuk pada tahap perencanaan dan pelaksanaan intervensi. Selain itu, kasus anak yang berada pada kategori sedang juga akan langsung diarahkan ke tahap perencanaan dan pelaksanaan intervensi. Jenis intervensi yang diberikan oleh sekolah tentunya bergantung jenis kasus yang dialami oleh anak. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bagian berikutnya



Foto-foto: Dok. Yusri

mengenai jenis layanan intervensi yang dapat diberikan oleh sekolah

TAHAP KEENAM:

Rujukan ke Penyedia Layanan Sosial

Ketika anak mengalami masalah psikologis tingkatan tinggi atau sedang mengarah ke tinggi, maka anak tersebut langsung akan dirujuk kepada penyedia layanan sosial seperti PKSAI/Dinsos atau UPTD PPA untuk mendapatkan pendampingan dan layanan ke profesional seperti konselor, psikolog, psikiater, dan lain-lainnya.

TAHAP KETUJUH:

Monitoring Pelaksanaan Intervensi

Untuk mengetahui keberhasilan jenis intervensi yang dilakukan oleh pihak sekolah, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi intervensi. Monitoring ini dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara kepada anak, teman anak, keluarga, dan warga sekolah lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi. Hasil dari monitoring, kasus anak tersebut bisa diarahkan ke tahap terminasi (penutupan kasus) karena dianggap intervensinya sudah cukup, bisa juga kasusnya dikembalikan ke tahap perencanaan intervensi untuk diberikan intervensi lanjutan, ketika pihak sekolah merasa anak tersebut masih membutuhkan intervensi

lanjutan dari sekolah, atau bisa juga kasus tersebut dirujuk kepada penyedia layanan sosial seperti Dinsos/PKSAI atau UPTD PPA, ketika sekolah menganggap kasus anak tersebut perlu mendapatkan pendampingan dari tenaga profesional.

TAHAP KEDELAPAN:

Terminasi

Tahap terminasi atau penutupan kasus dilakukan ketika proses intervensi yang diberikan kepada anak dirasa cukup dan masalah yang dihadapi oleh anak dianggap sudah dapat diselesaikan dengan baik.

Melalui mekanisme penanganan dan rujukan kasus anak berbasis sekolah ini maka diharapkan agar dapat membantu anak dan pihak keluarga untuk mendapatkan pendampingan dan akses layanan sosial yang tersedia. Selain itu, mekanisme ini juga secara langsung dapat membantu para penyedia layanan sosial untuk mempromosikan berbagai bentuk layanan sosial yang tersedia kepada pihak orang tua siswa.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Program Analyst pada Yayasan Indonesia Mengabdi dan dapat dihubungi melalui yusri@unm.ac.id



CURHAT GURU DI PELOSOK: ANAK DARI KELUARGA MISKIN MUNGKIN AKAN TETAP MISKIN

Oleh **ADI SIMANJUNTAK**



Foto : Ijazah/Dok. Kiat Guru

**Bagaimana caranya
lepas dari jerat
kemiskinan?, seperti
akan jadi pertanyaan
yang tak pernah selesai
di sekolah-sekolah
pelosok.**

M

ereka sudah menunggu di depan kelas dari pagi. Rambut disisir klimis, raut wajah berseri-seri, tapi hampir tak ada yang mengenakan seragam sekolah dasar (SD). Ah, seragam sekolah memang tak penting-penting amat. Yang penting adalah mereka datang tak terlambat ke sekolah, menunggu saya, si guru baru.

Saya tersanjung mendapat sambutan ini. Setelah mengucapkan salam, saya mempersilakan anak-anak untuk duduk. Mereka berhamburan di mana saja dalam ruangan kelas yang kecil di mana kotoran anjing dan bulu-bulu burung bertebaran tiap sisi. Suasana cukup riuh, dari hentakan meja, teriakan, kakak yang sibuk memangku adiknya, suara tangisan.

Selembar kertas saya ambil dari dalam tas. Lalu saya meminta anak-anak bergantian membaca isi kertas tersebut. Beberapa di antaranya menyahut, “Pak guru, saya tak bisa membaca.” Amboy, sekolah yang berlokasi di Sulawesi Tengah ini ternyata diisi siswa yang 90 persen di antaranya buta huruf.

Buta huruf mungkin cuma satu persoalan. Semangat tinggi mereka untuk menuntut ilmu kerap mental, ketika alarm panggilan untuk membantu orang tua berkumandang. Ya, pendapatan perkapita di kabupaten tempat sekolah ini berdiri di bawah satu juta rupiah. Banyak dari masyarakat yang tinggal di sini termasuk dalam golongan ekonomi rentan. Sehingga, mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak pun terpaksa terlibat untuk membantu pekerjaan orang tua bahkan hingga harus putus sekolah.

Ironisnya, susah bersusah payah kerja pun, kemiskinan tetap enggan beranjak dari mereka. Ini mengafirmasi penelitian

lembaga riset SMERU Research Institute (2019) bahwa, anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan lebih rendah ketika mereka dewasa. Penelitian yang dipublikasikan di makalah internasional Asian Development Bank (ADB) itu mencatat, pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87 persen lebih rendah ketimbang mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin, dilansir dari *The Conversation*.

Sayangnya, kemiskinan makin langgeng ketika pendidikan juga tak memberi kesempatan bagi anak-anak untuk lepas dari jerat tersebut. Anak dari keluarga berpendapatan rendah di sini memiliki keterbatasan ekonomi untuk menunjang proses pembelajaran mereka. Orang tua di sisi lain tidak terlibat aktif untuk urusan pendidikan anak, karena mereka harus bekerja bahkan meminta anak turut serta.

Sementara itu, guru-guru sekolah terlalu sibuk mengurus kebun dan sawah mereka. Kepala sekolah apalagi, barangkali mereka terlampaui sibuk dengan berbagai perjalanan dinas, sehingga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ludes. *Boro-boro* dibelanjakan untuk fasilitas, seperti spidol, penghapus, papan tulis, buku, atau perlengkapan lainnya.

Imbas dari berbagai hal ini akhirnya membuat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP dan SMA di kabupaten ini relatif rendah. Mayoritas anak yang sudah bekerja merasa sekolah tak signifikan mendukung upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Tak hanya itu, kualitas lulusannya pun sama memprihatinkannya. Jangan heran jika menemukan tamatan SD namun belum tahu caranya membaca. Apalagi di era pandemi di

mana mereka menghadapi situasi ketiadaan perangkat elektronik. Anak-anak mengalami *learning loss* yang sangat besar. Sehingga, itu kian memperburuk kualitas pendidikan di sana

Regulasi dan Peran Orang Tua

Regulasi pendidikan dapat berjalan apabila ada kontrol yang tepat terhadap regulasi itu. Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengupayakan berbagai cara untuk memoles dunia pendidikan. Namun, kerap kali mereka lupa memikirkan relevansi masing-masing kebijakan, sudah cukup tepatkah, apa lagi yang harus dievaluasi?

Tak melulu regulasi, dalam hal ini, orang tua sebagai pemegang kontrol terhadap anak juga punya andil mengawal proses pembelajaran. Sayangnya, banyak orang tua yang belum paham akan pentingnya keterlibatan tersebut, terutama orang tua yang berasal dari ekonomi rentan. Berdasarkan studi mengenai hasil belajar yang dilakukan oleh SMERU Research Institute, keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran memberikan dampak besar pada hasil belajar siswa. Hal ini bisa terus ditingkatkan dengan meminta orang tua terus berkomitmen, mengubah pola pikir, dan mau terlibat aktif dalam pendidikan anaknya.

Disarankan untuk orang tua agar sering mengajak anak-anak mengobrol dan berdiskusi. Mereka harus mulai mengubah *mindset*, bahwa pendidikan barangkali adalah cara jitu untuk lepas dari jerat kemiskinan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari Magdalene.com dan dapat dibaca pada tautan berikut: <https://magdalene.co/story/anak-keluarga-miskin-akan-tetap-miskin>

APA ITU 'INFORMATION OVERLOAD' DAN KENAPA PENTING DIPAHAMI PEKERJA

Oleh **KEVIN SEFTIAN**



Foto: Freepic.com

Di era kiwari di mana semua serba terdigitalisasi, sangat mudah mencari informasi melalui berbagai platform. Namun, kamu berisiko mengalami banjir informasi atau *information overload* yang berdampak buruk jika tidak dikelola. Hal tersebut bisa terjadi saat kamu melakukan beragam kerja sekaligus (*multitasking*), percakapan, atau memakai internet.

Jika kamu dihadapkan pada *information overload*, salah satu akibat yang dirasakan adalah kesusahan dalam mengambil keputusan. Tentunya, kamu tidak mau hal ini sampai terjadi waktu bekerja, bukan?

Magdalene akan menjelaskan padamu apa itu banjir informasi dan tips menghindari *information overload*. Yuk, kita simak.

Apa Itu *Information Overload* atau Banjir Informasi?

Menurut Indeed.com, banjir informasi atau *information overload* merupakan kondisi di mana seseorang mencerna terlalu banyak informasi dalam satu waktu.

Hal yang termasuk dalam informasi pun beragam, misalnya pesan, berita, artikel, konten di media sosial, maupun video.

Akibatnya, kamu harus memerhatikan dan memproses banyak hal dengan bersamaan yang menyebabkan kapasitasmu bekerja secara efektif jadi menurun. Lebih lanjut, hal ini nantinya akan membuatmu jadi susah membuat keputusan. Apabila dibiarkan, bahkan kamu rentan terkena *burnout*.

Sayangnya, di zaman yang serba digital, risiko mengalami *information overload* semakin tinggi dan sukar dihindari.

Contohnya, saat sedang membaca artikel di satu *website*, akan ada efek di mana kamu sulit memahami isi dari artikel tersebut. Peralnya, ada beragam informasi yang dijejalkan, dari format foto, video, tulisan, data, dan lainnya.

Karena itulah, memahami bagaimana cara mencegah dan tanggap terhadap *information overload* akan sangat membantumu dalam mengonsumsi informasi yang kamu butuhkan.

Kenapa Penting Menghindari Banjir Informasi?

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, banjir informasi bisa menyulitkan kamu dalam memutuskan dan susah untuk bekerja secara efektif.

Namun, tidak cuma alasan itu saja untuk menghindari *information overload*. Dikutip dari Interaction-design.org, berikut beberapa manfaat yang lainnya:

- menaikkan kualitas keputusan yang dibuat
- meningkatkan produktivitas kerja
- mengembangkan *mental clarity* serta fokus
- mengembangkan rasa ingin tahu dan menikmati proses menggali informasi

Tips Menghindari Banjir Informasi

Pastinya kamu pun tidak bisa menghindari untuk tidak memakai handphone atau laptop kamu dalam menghindari banjir informasi.

Dengan melakukan hal tersebut, justru bakal muncul masalah baru, seperti tidak bisa mengetahui tren terbaru di bidang industri yang kamu jalani.

Lalu, bagaimana cara sederhana untuk menghindari *information overload*? Dirangkum dari Forbes.com, berikut ini beberapa tips untuk menghindarinya.

1 Buat Batasan dalam Menerima Informasi

Meski ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari, misalnya email atau pesan dari rekan kerja serta atasan, ada keadaan di mana kamu tidak perlu mengonsumsi informasi.

Contohnya, kamu dapat membatasi informasi yang diterima dengan tidak mengakses media sosial, melihat situs berita atau membaca artikel yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaanmu.

Kamu bisa mencoba untuk menghitung jumlah informasi yang kamu terima setiap minggu dan mencatat bagaimana perasaanmu.

Dari situ, kamu tahu kalau berapa banyak sih informasi yang bisa kamu dapat tiap minggunya, tanpa membuat kamu jadi merasakan *information overload*.

2 Aktifkan Fitur Filter dan Blocker di Browser

Hal pertama yang bisa kamu coba adalah dengan memakai aplikasi *filtering* atau *blocker* yang bisa dipasang di *browser*-mu.

Dengan begitu, kamu membatasi informasi yang bisa diterima kala berselancar di dunia maya.

Bahkan, beberapa *filter* bisa mencegah kamu melihat situs tertentu misalnya media sosial. Sehingga, akan membuatmu jadi lebih fokus bekerja.

Blockers juga mencegah munculnya iklan di *website*, jadi membuat tampilan layar lebih bersih dan menghilangkan beragam bentuk distraksi.

3 Matikan Notifikasi Handphone dan Browser

Cara sederhana selanjutnya untuk menghindari banjir informasi adalah dengan menonaktifkan notifikasi di *smartphone* dan *browser*.

Contohnya, saat sedang bekerja bekerja, ada notifikasi teks dari teman, kamu pun tertarik untuk meninggalkan pekerjaan demi membaca pesan tersebut.

Dengan mematikan notifikasi juga kamu membuat lingkungan kerja lebih kondusif dan menghindari *information overload*.

4 Sering Menyegarkan Pikiran atau Istirahat Sejenak

Setiap hari kita pasti duduk di depan komputer atau laptop, menonton TV akan membuat kita memperoleh banyak informasi. Namun tidak kita sadari, informasi-informasi yang kita peroleh tersebut tidak semuanya betul-betul dibutuhkan.

Bahkan bila terlalu banyak informasi, akan membuat kita banyak pikiran. Jika dibiarkan, ini dapat membuat kita mudah stres.

Hal yang membantu kita supaya tidak stres, dengan menyegarkan pikiran. Menyegarkan pikiran bisa dilakukan dalam berbagai hal misalnya bertamasya, atau sekedar keluar kantor untuk membuat pikiran kita jadi lebih tenang.

5 Tentukan Sumber dalam Mencari Informasi

Kamu juga dapat menentukan sumber yang menurutmu bisa diandalkan dalam mencari informasi yang kamu butuhkan.

Dengan begitu, kamu jadi mendapatkan informasi yang benar-benar relevan. Di sisi lain, kamu jadi lebih menghemat waktu dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

6 Lakukan Kegiatan di Luar Ruang Tanpa Membawa Gawai

Jika kamu merasa terbebani karena banyaknya informasi yang diterima belakangan ini, cobalah sediakan waktu beraktivitas tanpa gawai.

Contohnya, berjalan kaki di luar tanpa membawa *handphone* bisa meningkatkan keadaan mentalmu. Kamu pun dapat mencoba meditasi untuk menambah fokus dan kesehatan mental jadi terjaga.

Nah, sudah kita bahas beberapa hal yang perlu diketahui tentang banjir informasi atau *information overload*. Apakah kamu punya cara tersendiri untuk menghindarinya?

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari Magdalene.Co dan dapat dibaca pada link berikut. <https://womenlead.magdalene.co/2022/04/14/apa-itu-information-overload/>



MKM sejauh ini terperangkap dalam seperangkat generalisasi. Ironinya, karena dari generalisasi tersebut, ada keinginan kuat mewujudkan pemberdayaan dan pengembangannya. kemudian ingin mewujudkan pemberdayaan dan pengembangannya. Sayangnya hal tersebut menghasilkan kinerja pemberdayaan dan pengembangan yang tidak efektif mencapai sasaran dan tidak efisien memanfaatkan sumber daya yang tersedia. UMKM adalah tiga entitas kelembagaan usaha yang memiliki *nature* yang patut dibedakan antara satu dengan yang lainnya, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Setiap entitas usaha ini, setidaknya memiliki di satu pihak ciri usaha yang berbeda, dan di lain pihak juga memiliki prospek usaha yang sejatinya tidak bisa disamakan. Patut dipahami bahwa ketiga entitas ini memiliki ruang gerak masing-masing yang juga bersifat dinamis. Masing-masing bisa sangat tidak permanen. Usaha mikro misalnya bisa saja kemudian beralih menjadi usaha kecil, ataupun sebaliknya. Demikian pula halnya dengan usaha menengah, bisa berkembang skalanya, menjadi usaha berskala besar, tetapi tidak tertutup kemungkinan bisa juga mengecil.



KONSEPTUALISASI FASILITASI UMKM

Oleh **A.M.SALLATU**



Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Dalam kaitan inilah patut disadari baik sifat dasar maupun kompleksitas masing-masing dalam upaya untuk memberdayakan dan menginisiasi pengembangannya.

Oleh karena itu, siapa pun yang ingin terlibat dalam pemberdayaan dan menginisiasi pengembangan UMKM, dituntut terlebih dahulu memiliki pemetaan program dan kegiatan yang akan dikembangkan yang sesuai dengan masing-masing ketiga entitas

kelembagaan usaha ini, untuk suatu kurun waktu tertentu. Sedangkan di sisi lain, setiap pemerintah daerah misalnya, perlu menetapkan lebih awal dan secara lebih mendasar kinerja apa yang diinginkan dari masing-masing entitas kelembagaan tersebut di daerah atau di wilayahnya. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa idealnya, setiap usaha mikro diharapkan mampu bertransformasi dari kondisi awalnya. Untuk

usaha kecil diharapkan mampu mengakumulasi marjin usaha. Sedangkan untuk usaha menengah diharapkan mampu diperkuat struktur dan skala usahanya untuk mengembangkan kegiatannya.

Dari sudut pandang ciri usaha, sebenarnya masing-masing ketiga entitas usaha ini bisa dicermati dari tiga aspek; pelaku, kegiatan usaha dan pelebagaan usaha. Dapat dikatakan setiap daerah atau wilayah, terdapat semacam batasan umum yang bisa diperlakukan. Pada usaha mikro, pelakunya adalah individu ataupun kelompok kecil individu. Sedangkan kegiatan usahanya, pada umumnya menjadikan tantangan nyata kehidupan yang dihadapinya yang selanjutnya dijadikan peluang atau dorongan untuk menginisiasi usaha. Adapun pelebagaan usahanya lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atau, dalam bahasa awam, bisa dikatakan untuk dapat mempertahankan dapurnya tetap mengepul.

Usaha kecil, pada umumnya merupakan usaha rumah tangga yang pada umumnya mengikuti usaha yang sama yang telah dilakukan oleh rumah tangga yang lain. Pelaku usaha kecil pada umumnya menduplikasi kegiatan usaha yang sama, sangat terbatas yang menginisiasi usaha yang benar-benar baru. Oleh karena itu, kegiatan usahanya juga lebih banyak merupakan kegiatan usaha agensi atau menjadi subordinasi dari kegiatan usaha yang sama yang lebih besar skalanya. Dengan demikian

Peran dan kontribusi UMKM pada perekonomian bukan sekedar penjumlahan kinerja, melainkan keseluruhan UMKM secara terintegrasi.

pelebagaan usahanya lebih banyak dibasiskan pada bagaimana meningkat dari tingkat subsisten kehidupan rumah tangganya.

Usaha menengah dapat dikatakan bahwa pelakunya sejak awal sudah berpikir untuk melakukan upaya atau penjajakan kewirausahaan. Oleh karena itu, kegiatan usaha menengah akan selalu berpikir bagaimana agar bisa dalam waktu yang relatif singkat mencapai titik impas (*break even point/BEP*). Dengan demikian, dalam perspektif masa depan usahanya, pelebagaan usaha menengah akan senantiasa berupaya untuk dapat merawat marjin usahanya untuk mengakumulasi modal.

Nampaknya akan lebih ideal bila sesuatu wilayah provinsi misalnya menetapkan kinerja kumulatif UMKM yang dipandang mampu dicapai, seperti yang dikemukakan di atas. Dengan demikian fasilitasi yang akan diprogramkannya untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM

pada skala kabupaten dan kota menjadi lebih terarah dan terstruktur. Oleh karena pada dasarnya UMKM itu terdapat pada kabupaten dan kota, sedangkan tingkat provinsi lebih diharapkan memberikan dukungan dan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan saja.

Mungkin saja ada variasi dari batasan-batasan diatas pada masing entitas UMKM dalam realitasnya, namun dengan penggambaran seperti ini dapat diharapkan setiap entitas bisa memberi kontribusi baik dalam kehidupan ekonomi pelakunya maupun secara kumulatif dalam kehidupan perekonomian. Peran dan kontribusi UMKM yang selama ini dianggap signifikan bagi perekonomian, sepatutnya bukan dalam perspektif penjumlahan kinerja melainkan kinerja UMKM secara keseluruhan dan terintegrasi dalam suatu wilayah.

Apa yang bisa disimak selama ini adalah mulai dari skala nasional terjadi generalisasi dalam skema pemberdayaan dan pengembangan UMKM, bahkan sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Bahkan selintas terlihat bahwa substansi sasaran kegiatan untuk masing-masing entitas UMKM relatif sama saja. Belum lagi bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya, apa yang dilakukan pada skala kabupaten dan kota, itu pula yang dilaksanakan pada skala provinsi. Padahal sepatutnya, kinerja kumulatif UMKM diletakkan pada skala provinsi dan dengan demikian pula skema fasilitasnya. Kinerja kumulatif yang dimaksud inilah yang akan merupakan kontribusi peranan keberadaan UMKM setiap provinsi pada skala nasional, yang akan menjadi acuan alokasi program dan anggaran APBN.

Dengan perspektif sebagaimana diungkapkan di atas, sebenarnya kategorisasi ciri usaha (pelaku usaha, kegiatan usaha dan kelembagaan usaha) dalam lingkup UMKM sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diformulasikan ke dalam matriks dengan ketiga entitas (usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah) dalam UMKM tersebut, untuk melakukan *mapping* program dan kegiatan fasilitasi dan inisiasi pengembangan. Dengan menempatkan ketiga entitas ini sebagai kolom misalnya dan ketiga kategorinya sebagai baris, yaitu dalam matrix tiga kali tiga. Melalui matrix ini memungkinkan untuk mengidentifikasi elemen-elemen program dan kegiatan sesuai batasan yang dikemukakan di atas dan akan sesuai pula dengan kebutuhan nyata masing-masing entitas UMKM di setiap daerah.

Pada intinya, patut dipahami bahwa perbedaan yang ada pada ketiga entitas dalam UMKM, tidak sepatutnya digeneralisasi. Oleh karena memang memiliki sifat dasar usaha yang berbeda. Peran dan kontribusi UMKM pada perekonomian bukan sekedar penjumlahan kinerja, melainkan keseluruhan UMKM secara terintegrasi. Optimalisasi kegiatan fasilitasi dan inisiasi pengembangan yang ingin dikembangkan bisa dicapai melalui skala provinsi, yang sekaligus mengemban fungsi pengendali untuk mencapai kinerja kumulatif UMKM di wilayahnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JikTI) dan dapat dihubungi melalui email madjid76@gmail.com

BEGINI URGENSI PENGUATAN TRADISI BAHARI UNTUK KELESTARIAN LAUT DI INDONESIA TIMUR

Oleh **MAHMUD ICHI**



Sebagai negara kepulauan, masyarakat di Indonesia timur lekat dengan tradisi kearifan lokal kehidupan laut yang telah berusia puluhan, bahkan ratusan tahun.

Akan tetapi kearifan lokal kehidupan laut itu seringkali dikesampingkan dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Padahal aspek kebudayaan dalam konteks negara kepulauan maritim haruslah ditempatkan pada posisi yang strategis.

Hal tersebut terungkap dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Jaringan Nusa pada pertengahan April 2022, bertema “Menguatkan Budaya Bahari Mempertegas Jati Diri Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil” yang menghadirkan

narasumber dari unsur pemerintahan, akademisi dan komunitas lokal, Jaringan Nusa, merupakan LSM yang *concern* pada isu pesisir dan pulau-pulau kecil serta memfokuskan kegiatannya di Indonesia bagian timur termasuk Maluku Utara.

Para pembicara mengupas berbagai masalah masyarakat adat pesisir dan praktik tradisi bahari yang ada di Indonesia timur sebagai penanda jati diri kehidupan selaras alam setempat yang sebenarnya sangat cocok diterapkan untuk kelestarian sumber daya laut. Sehingga menjadi penting untuk menjaga tradisi budaya bahari tersebut.



Foto: Yusuf Ahmmad/Yayasan BaKTI

“Salah satu contoh, saat ini sangat banyak tradisi bahari terutama dalam beragam cara menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya laut, mulai tergerus oleh hadirnya mesin dan teknologi,” kata Alex Jhon Ulaen dari Pusat Kajian Komunitas Adat dan Budaya Manado dalam webinar tersebut.

Pemanfaatan teknologi dan inovasi alat tangkap ikan, lanjut Alex, seringkali menghilangkan kearifan lokal seperti dihadapi masyarakat di Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara. Dia mengutip disertasi sejarawan Profesor Doktor B. Lopian berjudul “Orang Laut, Bajak Laut dan Raja Laut” yang menyebutkan peralihan dari tradisi bahari yang kuat di

Indonesia timur ke tradisi maritim sudah terjadi sejak awal abad ke-19.

“Ketika pakar hukum hanya mengenal hak ulayat di darat, tetapi para peneliti dari LIPI mengatakan bahwa ada hak ulayat laut yang mereka temukan di Kepulauan Sangihe hingga bagian timur Indonesia lainnya. Nah ada temuan dari riset itu tradisi bahari itu terancam punah,” katanya.

Lalu siapa saja pendukung tradisi bahari itu?

Alex menyebut pendukung tradisi bahari di nusantara itu adalah orang laut di bagian barat nusantara, masyarakat Suku Bajau, dan bajak laut yang masih ada, pelayar serta pelaut tradisional.



Tradisi *maneke* di Kepulauan Sangihe. Masyarakat berkumpul secara massal, dengan peralatan sederhana mereka menggiring ikan ke tepian untuk ditangkap. Foto: Tangkapan layar Youtube /Mr. Hawe

Dia contohkan, tradisi bahari Kepulauan Sangihe mengenal kegiatan *Seke Maneke* yakni menangkap ikan menggunakan alat tangkap tradisional, di mana hasil tangkapannya di bagi ke semua warga kampung, termasuk ada hak janda dan anak yatim. “Alat *Seke* terakhir ditemukan pada 2010 di Pulau Makalehe yang rusak dihantam badai. Di pulau itu ada 13 titik hak ulayat laut. Saat ini tradisi bahari yang ada praktik *seke maneke* itu berubah ke *Somaseke* dan terakhir menggunakan *Pajeko*,” jelasnya.

Ada beberapa catatan seiring peralihan bahari ke *maritime*, lanjutnya, ditandai dengan motorisasi sampan bercadik menggunakan mesin pompa dari Filipina yang dinamai *punboat* yang mengikis tradisi bahari. Padahal ketika mereka menggunakan sampan misalnya, saat mendayung mendendangkan nyanyian dan lagu. Tidak itu saja, nelayan atau warga juga punya pengetahuan melaut sehingga dapat menghindari waktu arus ombak dan lain lain.

Alex yang juga pemerhati sejarah dan budaya bahari itu menjelaskan, tradisi bahari di

ambang kepunahan merujuk pada *maneke*’ tradisi menangkap ikan dari Kepulauan Sangihe itu. “Tradisi *maneke*’ merupakan aktivitas menangkap ikan dengan peralatan tradisional yang dilakukan secara massal dan terorganisir. Alat tangkap utama dalam tradisi *maneke*’ itu terbuat dari bambu halus dan rotan yang diberi nama *pandihe*,”

Sedangkan O.Z.S. Tihurua dari Yayasan Jala Ina Maluku menjelaskan masyarakat adat di pulau-pulau kecil menghadapi permasalahan yang sama dengan masyarakat adat di Indonesia timur, terutama masalah batas pemanfaatan wilayah adatnya.

Menurutnya, masyarakat kepulauan Maluku tinggal di tiga karakteristik pulau, yakni pulau kecil dengan daratan dan hutan yang luas seperti di Seram dan Buru, pulau lebih kecil di mana masyarakat yang hidup dengan karakter pulaunya, punya daratan dan kebun, serta hidup di pulau sangat kecil. Karakter pulau ini menunjukkan karakter negeri adat dan hukum adatnya. Masyarakat di pulau kecil punya orientasi laut, tapi ada kebun atau dusun.



Foto: Tangkapan layar Youtube /KKP

Sementara di pulau lebih kecil berimbang antara darat dan laut. Sementara yang tinggal di pulau paling kecil masyarakatnya punya orientasi laut secara menyeluruh.

Dia juga memaparkan, kategorisasi orang Maluku dilihat dari tempat pemukimannya. Yakni orang gunung misalnya di Seram, orang pesisir dan orang pulau.

Yang kedua dilihat dari asal usul. Di Maluku antara orang negeri dan bukan orang negeri sangat jelas. Kategorisasi orang Maluku berdasarkan asal usul ini berimplikasi terhadap hak-hak dalam wilayah adat yang diklaim sebagai masyarakat adat suatu negeri. Ketiga, dari orientasi penghidupannya. Ada petani, nelayan dan sedikit pedagang. Jadi masyarakat di pulau kecil misalnya di selatan Seram atau yang berhadapan dengan laut Banda, orientasi ke laut tidak terlalu dominan.

Terkait negeri adat di Maluku, ketika diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mendapatkan ruang yang diberikan negara untuk pengembalian nama sesuai yang

digunakan masyarakat yakni negeri. Pengembalian nama ini secara tidak langsung telah memberikan ruang terkait pengimplematasian pranata hukum adat dalam pengelolaan negeri. “Di Maluku ada dua negeri. Pertama negeri adat dan kedua negeri administratif. Ini juga ada kategorisasi di Undang-Undang Desa yakni desa dan desa adat,” katanya.

Sebagian besar negeri adat berada di wilayah pesisir dibanding masyarakat pegunungan. Masyarakat pesisir kurang lebih 80%, sementara pegunungan hanya 20%. Ini hanya ada di Seram dan Buru. Sementara di sebagian besar masyarakat tinggal di pesisir.

Terkait soal ruang hidup ada tumpang tindih. Dalam keseharian mereka ada pemahaman yang berbeda di masyarakat. Misalnya masyarakat menyadari bahwa laut atau hutan di belakang negeri itu wilayah adat mereka. Jadi soal, saat ini hampir semua hutan diklaim sebagai hutan negara kecuali sudah diusulkan sebagai hutan adat. Walaupun di sisi

pemerintah seperti itu tapi masyarakat tetap menganggapnya wilayah adat mereka.

“Ini yang seringkali memunculkan protes ketidakpuasan ketika diklaim dan diberikan ke pihak ketiga. Masyarakat di pesisir maupun pulau kecil hidup dalam ketidakstabilan, walaupun sebenarnya negara memberikan ruang pengakuan terhadap wilayah masyarakat adat,” jelasnya.

Terkait wilayah masyarakat adat sendiri masih terdapat beberapa masalah. Masyarakat adat hidup dalam situasi yang tidak stabil terutama batas wilayahnya.

“Terdapat tumpang tindih batas kepemilikan dan pemanfaatan wilayah adat. Adanya pemahaman yang berbeda mengenai ruang hidup masyarakat sehingga perlu adanya aturan yang tegas agar masyarakat mengetahui batas ruangkelolanya,” jelasnya.

Sehingga itu Yayasan Jala Ina turut mendampingi warga dalam pembuatan peraturan negeri dan penguatan kapasitas masyarakat soal isu bahari.

Sementara Mohammad Ismail Koordinator Kelompok Masyarakat Hukum Adat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam webinar itu menyampaikan bahwa, Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak kebudayaan. Banyaknya kebudayaan tersebut membawa dinamika tersendiri di tiap daerah.

Terdapat berbagai aturan dalam menjamin masyarakat pesisir dan pulau kecil. Misalnya Dalam Perpres No.53/2021 mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 telah menetapkan strategi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap Masyarakat Hukum Adat.

“Kita telah memiliki beragam aturan untuk menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mulai dari UUD, Undang-undang, Peraturan Presiden hingga peraturan turunannya,” jelas Ismail.

KKP menurutnya, memiliki fasilitas dalam perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. KKP telah

memfasilitasi kurang lebih sebanyak 32 masyarakat adat dan lokal untuk dilakukan pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami telah memfasilitasi banyak daerah terkait pengakuan masyarakat adat. 18 di antaranya telah keluar melalui peraturan Bupati/Walikota tentang masyarakat hukum adat di 5 provinsi,” jelasnya.

Senada dengan itu, Sjamsul Hadi Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memaparkan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sehingga diperlukan identifikasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Terutama dalam hal program pemerintah mendorong pelestarian budaya lokal.

Pemerintah lebih menekankan program bersifat *bottom up*. Menempatkan masyarakat adat sebagai subyek. “Jadi sebelum masuk menerapkan program harus menganalisis dulu apa harapan dan mimpi mereka. Dari situ kami bisa masuk memberikan penguatan sehingga mereka bisa berupaya melanjutkan kehidupan dan tetap menjaga kearifan lokal yang dimiliki,” jelasnya.

Dikatakan prinsip pemberdayaannya adalah memanusiakan manusia yang lebih inklusif dengan peran partisipatif dan kemandirian. Tujuannya inisiatif lokal ini menjadi titik pangkal utama pemberdayaan masyarakat.

Program yang dilakukan seperti sekolah lapang pemberdayaan masyarakat untuk pemberdayaan perempuan, pemuda adat dan juga penguatan lembaga adat. Salah satunya program pemberdayaan untuk masyarakat adat Moi di Mlaumkarta, Sorong Papua Barat. tahun 2021. “Namun terkendala pandemi COVID-19 sehingga penguatan lembaga adat suku Moi yang direncanakan tahun lalu tidak bisa dilaksanakan,” pungkasnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari Mongabay Indonesia dengan tautan: <https://www.mongabay.co.id/2022/05/10/begini-urgensi-penguatan-tradisi-bahari-untuk-kelestarian-laut-di-indonesia-timur/>



Pandemi, Penutupan Sekolah, dan Perkawinan Anak

STRANAS PPA DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Oleh **AYU PUTU EKA NOVITA**

Sudah hampir dua tahun Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 telah serta merta mengubah pola hidup masyarakat. Untuk memperlambat penularan virus, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi orang dewasa, tapi juga anak-anak, terutama karena penutupan sekolah yang merupakan aktivitas utama mereka. Pandemi COVID-19 telah memaksa perubahan sistem pembelajaran menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan kurikulum darurat yang ternyata masih sulit dilaksanakan secara optimal. Sekolah, anak didik, dan juga keluarga tidak siap untuk beradaptasi dengan perubahan drastis dan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru.

Pembelajaran dari rumah menimbulkan beberapa dampak langsung yaitu penggunaan teknologi tanpa batas, mulai dari teknologi untuk pembelajaran ataupun kegiatan lain yang menjadikan anak harus dapat memilah informasi yang diterima, kejenuhan pada pembelajaran dari rumah menuntut kreativitas guru, orang tua dan anak sehingga kualitas pembelajaran tidak menjadi berkurang, hal ini terjadi karena selama ini sekolah diposisikan sebagai sentral pelaksana tugas-tugas pendidikan.

Masyarakat menganggap bahwa dengan mengirimkan anak ke sekolah maka semua tanggung jawab pembentukan karakter dan perubahan perilaku dibebankan kepada sekolah sebagai pelaksana layanan pendidikan. Akibatnya, saat sekolah ditutup banyak orang tua yang kelabakan untuk mengelola pembelajaran anak di rumah. Keluarga yang selama ini minim peran dalam melakukan proses belajar mengajar menjadi bingung, stres, bahkan kesal, dan menuduh sekolah melepaskan tanggung jawab.

Untuk mengetahui keluhan masyarakat, KPAI melakukan survei yang menunjukkan bahwa dalam proses PJJ masih minim interaksi antara guru dan murid sehingga murid banyak tidak mengerti. Hal ini akhirnya menyebabkan beban kepada orang tua untuk menjelaskan kepada anak. Tidak sedikit yang berujung melampiaskan kekesalan pada anak. Kondisi ini jelas membuat rumah menjadi lingkungan yang tidak nyaman bagi anak. Sekolah merupakan jaringan pengaman bagi banyak orang, terutama anak perempuan (BBC.co.uk, 8 September 2020).

Dampak lainnya adalah meningkatnya Angka Pernikahan Anak, untuk menghitung data peningkatan angka pernikahan anak maka penanganan pernikahan usia anak perlu perhatian lebih dari pemerintah. Undang-undang perkawinan menyatakan minimal usia menikah bagi wanita 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun sedangkan undang-undang perlindungan anak menyatakan 18 tahun masih

tergolong usia anak. Belum siapnya organ reproduksi pada usia anak berdampak pada Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) bahkan kematian saat melahirkan. Pemerintah perlu mengatasi masalah pernikahan usia anak yang masih tinggi. Penting untuk mengetahui peran dari *stakeholders* dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak.

Stakeholders yang terlibat dalam Pendataan Percepatan Program Pencegahan Pernikahan Anak adalah sebagai berikut.

Kementerian BKKBN dari pusat hingga daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, memprogramkan penanganan pernikahan usia anak dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memprioritaskan penanganan dalam bentuk Perda.

KPPPA melalui Program Perlindungan Anak, memiliki pendekatan Pencegahan perkawinan anak adalah satu-satunya program percepatan yang tidak bisa ditunda lagi. Menilik data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak, artinya sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana 1 dari 100 laki-laki berumur 20 – 24 tahun menikah saat usia anak, pendataan yang terintegrasi juga diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mengumpulkan, mengolah dan menerbitkan data perkawinan anak di Indonesia di tingkat nasional dan provinsi. Data-data ini sangat bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. BPS diharapkan juga dapat menghasilkan data di tingkat kabupaten/kota agar dapat menjadi

bahan masukan terkait upaya-upaya intervensi pelayanan yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota.

Kementerian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan mengencarkan sosialisasi kesehatan reproduksi, “Praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran atas hak-hak anak yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupannya di masa yang akan datang sehingga dengan demikian, perkawinan anak juga merupakan pelanggaran HAM karena hak anak adalah bagian dari HAM. Diakui salah satu tantangan terbesar adalah karena perkawinan anak sangat lekat dengan aspek tradisi, budaya dan masalah ekonomi.

Kemendikbud Ristek hingga Dinas Pendidikan selain memiliki data siswa melalui Dapodik persatuan Pendidikan *by name by address* juga harus memiliki data sensitive berkenaan Anak Putus Sekolah (ATS) akibat terjadinya Pernikahan Anak, Dinas Pendidikan menginstruksikan penanaman anti pernikahan usia anak kepada sekolah. Perkawinan anak berdampak masif di antaranya meningkatnya resiko putus sekolah, pendapatan rendah, kesehatan fisik akibat anak perempuan belum siap hamil dan melahirkan dan ketidaksiapan mental membangun rumah tangga yang memicu kekerasan, pola asuh tidak benar hingga perceraian. Itu sebabnya perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kantor Kecamatan memiliki peran yang menjadi garis depan Program Penuntasan Pernikahan Anak, kecamatan memprioritaskan penanganan masalah pernikahan usia anak saat musrenbang yang secara advokasi dapat menggerakkan *communities leader* untuk mengawal program tersebut dengan rencana penganggaran yang representatif dan terintegrasi pada masing-masing OPD.

Sedangkan *stakeholders* lainnya adalah Kemendagri hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk BAPPENAS melakukan peluncuran Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) menyatakan bahwa isu

perkawinan anak adalah isu mendesak yang harus segera diselesaikan.

Kementerian agama hingga Kanwil. Kementerian Agama, untuk menjalankan program langsung kepada masyarakat, dari mempersiapkan proses calon pengantin (Catin) hingga bimbingan perkawinan (Bimwin).

Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dan masyarakat agar berupaya menyadarkan sekitarnya untuk tidak menikah atau menikahkan di usia anak.

NGO Anak dan Masyarakat memiliki peran yang berdampingan sama-sama mensosialisasikan pencegahan pernikahan anak.

Dengan diterbitkannya dokumen Stranas PPA diharapkan semua pemangku kepentingan di berbagai sektor dapat meningkatkan komitmen masing-masing dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Kemen PPPA juga telah melakukan *re-launching* Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak dengan merangkul semua pihak utamanya pimpinan daerah yang masuk dalam 20 provinsi dengan angka perkawinan anak di atas angka nasional.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyusul ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan serta menanggapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Strategi yang paling penting untuk dilakukan adalah mengubah pandangan masyarakat mengenai perkawinan anak dan dengan sinergi dan kerja bersama dengan berbagai pihak, praktik-praktik perkawinan anak dapat kita percepat penghapusannya secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah staf pada Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bappenas. Dapat dihubungi melalui email ayu.eka@support.bappenas.go.id



NOKEN ADAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA

Oleh **ITA IBNU**



Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia semakin pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai mencapai 73,7% dari total penduduk yang tercatat berjumlah 277,7 juta orang pada Januari 2022 (*We Are Social, 2022*).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut turut direspons oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam PT. Kasuari sebuah perusahaan yang bergerak di *Software House*

yang berlokasi di Sorong, Papua Barat. Adalah Daniel Sedik, *CEO* dan *Founder* dari PT Kasuari. Salah satu produk dari perusahaan ini adalah Noken Adat, sebuah *platform* digital sebagai kontribusi sosial yang bergerak dalam pendampingan masyarakat adat di tanah Papua agar melek teknologi.

Noken Adat, bergerak di *Social enterprise* mengembangkan jasa pendampingan masyarakat adat untuk membantu menghubungkan masyarakat adat dengan mitra Noken Adat yaitu dari LSM, Tokoh UMKM, *Influencer*, untuk menyelesaikan permasalahan terkait aturan adat, perizinan adat, pelatihan UMKM, atau yang lainnya yang berhubungan dengan kearifan lokal dengan cara pendekatan langsung ke tokoh masyarakat adat dan juga ke calon mitra noken adat yang terealisasi juga dalam bentuk *platform* (*website, mobile*) Noken Adat.

Noken Adat hadir mengingat saat ini Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sampai saat ini masih menerapkan hak ulayat dalam status hak atas tanah. Dalam penerapannya terdapat berbagai masalah yang timbul disebabkan beberapa hal, ketidakjelasan batas-batas wilayah hak ulayat masyarakat pribumi atau yang dikenal dengan masyarakat adat Papua, sehingga menghambat proses pemindahan hak atas tanah, dan malah menimbulkan konflik horisontal antar suku antara masyarakat adat dan pemerintahan daerah terkait batas administrasi wilayah adat dan wilayah pemerintahan. Dampaknya bagi masyarakat adat adalah masyarakat adat akan disingkirkan dari wilayah adat, perampasan wilayah masyarakat adat yang akan berujung pada pelanggaran HAM.

Sehingga Noken Adat hadir sebagai wadah untuk mengaspirasikan dan mengekspos suara masyarakat adat melalui platform teknologi.

Noken Adat menyediakan beberapa layanan sebagai berikut.

Layanan pendidikan. Proses pembelajaran seputar kearifan lokal budaya setempat.

Mitra Usaha. Noken Adat menjalin kerja sama dalam pendampingan UMKM dengan produk berbasis kearifan lokal. Bagi UMKM

yang memiliki usaha/produk yang berbasis kearifan lokal dengan melakukan pendampingan dalam proses branding dan mengakses *marketplace*. Mama-mama membuat produk berbasis kearifan lokal, dan mereka tidak tahu bagaimana cara memasarkan produk mereka, mengekspos kelompok mereka, sehingga kerja sama dengan mama-mama adalah mereka menyiapkan produknya dan Noken Adat melakukan pendampingan untuk pembuatan *social branding*, membantu promosi, mendampingi dalam membuat akun dan mengakses *marketplace*. Walaupun di Noken Adat juga menyediakan platform untuk menjual produk, namun setelah melakukan riset tak dapat dimungkiri Noken Adat masih kalah saing dengan *platform marketplace* yang telah ada. Pendampingan tak hanya di awal, namun hingga mereka dapat berjalan sendiri memasarkan produknya.

Mitra Berita, Noken Adat hadir menyediakan blog berita khusus yang mengangkat topik seputar masyarakat adat. Bekerja sama dengan sukarelawan di beberapa daerah di Papua seperti di Sorong Selatan bekerja sama dengan *Selo Wet'fi* Papua, Komunitas Petarung (Peduli Tata Ruang) di Maybrat, Dewan Perwakilan Masyarakat Adat (DEPEMA) di Maybrat dan Tambrau, Yayasan Sekolah Bisnis Papua, dan Rifan Papua yang bergerak di seni ukir. Mereka diberi akun di platform Noken Adat, mengelola blog berita sehingga mereka bisa mengekspos langsung berita, tulisan tanpa sekat. Selain itu teman-teman LSM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat.

Mitra Konsultan, menyediakan jasa konsultan terkait permasalahan yang dialami masyarakat adat.

Tour and Guide, Noken Adat hadir menyediakan layanan *tour & guide* ke *spot* wisata yang berbasis kearifan lokal di sekitar lingkungan masyarakat adat.

Saat ini Noken Adat berfokus di Papua dan Papua Barat dan saat ini masih fokus pada mitra usaha dan blog berita. Untuk mitra usaha masih berfokus di Sorong dikarenakan akses dengan

jasa pengiriman lebih mudah, sedangkan untuk pemilihan kelompok masyarakat yang akan didampingi, Noken Adat memiliki pertimbangan khusus dan melakukan beberapa rangkaian riset sebelum memutuskan jenis pendampingan yang akan diberikan. Mama-mama yang tergabung dalam kelompok, kontinyu memproduksi barang dalam jumlah dan waktu yang lama. Ini juga untuk mengakali keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Noken Adat saat ini.

Walaupun masih terdapat tantangan dalam menjalankan Noken Adat seperti keterbatasan akses internet di beberapa lokasi di Papua dan Papua Barat, keterbatasan sumber daya manusia untuk mendampingi kelompok masyarakat adat, namun tak menyurutkan semangat mereka. Melalui jejaring yang dibangun di Noken Adat, semakin memperkuat relasi dan kerja sama dengan mitra dan masyarakat adat, saling mempromosikan produk. Bukan hanya itu, mereka juga saling berbagi cerita, tular pengalaman dan pengetahuan lokal mengenai hutan adat, tanah ulayat, budaya, bahasa yang kini hampir punah. Bagaimana mereka mendokumentasikan seluruh kebudayaan dan kearifan lokal ini dapat terus lestari.

Visi besar Noken Adat adalah masyarakat adat sejahtera di era teknologi. Noken Adat percaya jika *platform* ini mampu mendatangkan manfaat dan hasil yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat adat Papua karena dikerjakan secara bersama-sama, kolaboratif dengan berbagai mitra sehingga tujuan pun dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu kesejahteraan bagi masyarakat adat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Bagi Anda yang tertarik bekerja sama dapat menghubungi email admin@nkenadat.com atau mengunjungi media sosial [@nokenadat](https://www.instagram.com/nokenadat).



Lebih lanjut tentang Noken Adat, kunjungi **YouTube BaKTI Foundation**

KLIK BAIK, MENAKLUKKAN TANTANGAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN INOVASI

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Belakangan ini akrab terdengar kata inovasi di kalangan pemerintah khususnya terkait inovasi pelayanan publik. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan kebijakan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menciptakan minimal satu inovasi utama setiap tahun yang dikenal dengan gerakan *One Agency, One Innovation*.

Inovasi sendiri dimaknai sebagai terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Semangat berinovasi ini pula yang diyakini oleh pemerintah kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan. Inovasi di Bantaeng didefinisikan dengan *tagline innovation for happiness* atau inovasi untuk kebahagiaan. “Inovasi adalah cara baik untuk membuat orang bahagia dan yang melakukan juga bahagia. Jalan kebaikan untuk membuat orang lain bahagia dan kita bahagia. Semua kerja-kerja yang dilakukan adalah kerja-kerja untuk kebahagiaan.” Ungkap Rahman Ramlan salah seorang inisiator terbentuknya KLIK Baik.

Di kabupaten Bantaeng, kebijakan *one agency one innovation* dinaikkan targetnya menjadi *one agency three innovations*. Untuk itu, tentu membutuhkan suatu wadah dalam rangka melahirkan inovasi, mengelola inovasi, mengembangkan inovasi, dan bahkan mereplikasi inovasi sesuai dengan konten lokal yang berlaku di Kabupaten Bantaeng. Tidak heran kalau Bantaeng menjadi salah satu kabupaten

dengan jumlah inovasi yang signifikan di mana salah satunya diukur dengan peningkatan kualitas layanan publik dan banyaknya inovasi yang dikirimkan untuk mengikuti kompetisi baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap geliat inovasi di Bantaeng adalah hadirnya Klinik Inovasi Kesehatan atau disingkat KLIK Baik. Sebuah terobosan baru untuk terus membangun budaya inovasi di kalangan birokrasi khususnya dalam naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap kaku, strukturalis membuat para penyelenggaranya terkesan tidak berani mengembangkan kreativitas dalam menjalankan kerja-kerja organisasi dalam memberikan pelayanan ke publik. Kondisi ini membutuhkan sebuah wadah dalam membuka cakrawala berpikir dalam menghadapi era saat ini yang mengedepankan inovasi.

Tentunya ini menjadi modal dasar bagi dinas kesehatan untuk mempertahankan status dinas paling inovatif di Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan budaya inovasi tersebut, maka dibutuhkan sebuah program pengembangan inovasi yang berkesinambungan, konsisten dan memberi perubahan yang terbaik dengan membentuk sebuah Klinik Inovasi Kesehatan.

Menurut Rahman Ramlan lahirnya KLIK Baik diawali dengan keinginan mewadahi semangat ASN untuk bisa mengembangkan ide-ide inovasi, karena KLIK Baik dapat memberikan manfaat lebih besar apabila semua pihak bisa terlibat bersama-sama dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik Bantaeng. Di dalam Dinas Kesehatan sendiri pelayanan dilaksanakan

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bagaimana agar pelayanan yang baik ini dapat dirasakan lebih luas? Maka, tim Dinas Kesehatan mulai merangkul pihak-pihak luar untuk berkolaborasi agar sama-sama punya kepedulian sehingga dampaknya bisa terasa lebih luas.

Fungsi KLIK Baik dalam hal ini adalah membantu tim Dinas Kesehatan dalam menyusun strategi pelayanan. Inovasi yang dibuat bisa mengakselerasi pencapaian tujuan, bisa memastikan SPM berjalan dengan baik melalui serangkaian pelatihan, asistensi, monitoring secara berkala, merawat semangat, memastikan tim menjaga keberlanjutan inovasinya.

Pengembangan Inovasi Kesehatan melalui Pembentukan Klinik Inovasi Kesehatan atau disingkat KLIK Baik merupakan terobosan baru untuk terus membangun budaya inovasi di kalangan birokrasi khususnya dalam naungan dinas kesehatan. Melalui inovasi-inovasi yang dilahirkan dan dikembangkan melalui pendampingan di KLIK Baik, inovasi di bidang kesehatan dapat berkontribusi mempercepat perwujudan Visi Kabupaten Bantaeng yakni "Terwujudnya Masyarakat Bantaeng Yang Sejahtera Lahir Batin, Berorientasi Pada Kemajuan, Keadilan, Kelestarian dan Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal".

Mengapa KLIK Baik?

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada saat ini membutuhkan terobosan-terobosan pelayanan yang dapat mendukung terciptanya kolaborasi para pihak untuk mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah setempat.

KLIK Baik hadir untuk memfasilitasi pelaku di bidang kesehatan baik itu di lingkup dinas maupun di UPTD seperti puskesmas dalam melahirkan inovasi baik dalam kerangka mendukung kinerja bidang kesehatan maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang prima.

Inisiasi terbentuknya KLIK Baik adalah sebagai ruang dalam menggali ide-ide kreatif inovatif dalam menjawab tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program strategis yang



tertuang di dalam Renstra dan Renja Dinas Kesehatan dan atau RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023.

Apa itu KLIK Baik?

KLIK Baik adalah akronim dari Klinik Inovasi Kesehatan Bantaeng yang Inspiratif dan Kolaboratif. KLIK Baik adalah program pendampingan yang dibangun untuk menumbuhkembangkan inovasi dari dalam birokrasi pemerintah daerah khususnya di dinas kesehatan melalui proses konsultasi hingga bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi yang menjadi rangkaian proses untuk memunculkan inovasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, serta efektivitas institusi kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Klinik Inovasi Kesehatan berfungsi sebagai ruang belajar yang terdiri atas : 1) ruang inspirasi; 2) ruang konsultasi; dan 3) ruang implementasi. Klinik Inovasi Kesehatan memiliki tenaga ahli yang memberi asistensi kepada para Pimpinan dan Staf pelayanan Kesehatan untuk berkonsultasi mengembangkan idenya menjadi inovasi.

Dengan adanya Klinik Inovasi Kesehatan diharapkan inovasi yang dilahirkan oleh Tim Dinas Kesehatan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan prima. Hal ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta kualitas pembangunan.

Apa Tujuan yang ingin dicapai KLIK Baik?

Tujuan dibentuknya KLIK Baik adalah untuk membangkitkan semangat inovasi ASN Dinas



Foto: Dok. Abdul Rahman Ramli

Kesehatan Kabupaten Bantaeng dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di saat semangat berinovasi sudah muncul ASN akan dapat mengidentifikasi dan menemukan gagasan inovasinya. KLIK Baik juga bertujuan memfasilitasi ASN Dinas Kesehatan agar dapat menuangkan ide-ide inovasi menjadi rencana aksi yang direalisasikan dalam bentuk layanan kepada masyarakat.

Selain memfasilitasi dan mendampingi proses identifikasi dan menemukan gagasan inovasi, KLIK Baik juga memfasilitasi proses pertukaran pengetahuan di antara ASN dalam lingkup Dinas Kesehatan. Pertukaran pengetahuan salah satunya dilaksanakan dengan proses dokumentasi dan publikasi Gerakan Inovasi Kesehatan di lingkup pemerintah daerah dalam upaya mendorong daerah untuk terus melakukan inovasi secara berkesinambungan.

Bagaimana KLIK Baik diimplementasikan?

KLIK Baik menjadi bagian dari visi Bupati yang menginginkan semua elemen bergerak membangun Bantaeng melalui inovasi karena beliau percaya hanya dengan inovasi lah perubahan bisa dilakukan, bisa mencapai visi misi dengan cepat.

Program KLIK Baik merupakan sebuah *grand design* dari mimpi besar Dinas Kesehatan untuk menjadi terdepan dalam pengembangan inovasi di Kabupaten Bantaeng dan memberikan pengaruh hingga tingkat provinsi dan nasional yang akan memberi dampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kebanggaan bagi daerah.

Untuk memastikan proses pengembangan inovasi berjalan optimal maka dibentuk sebuah Klinik Inovasi Kesehatan yang merupakan sebuah wadah berprosesnya pendampingan, asistensi, dan fasilitasi terhadap penumbuh-kembangan semangat dan aksi nyata dalam berinovasi.

Klinik Inovasi Kesehatan sebagai ruang belajar mengembangkan metode *Design Thinking* dalam pendampingan dan asistensi. Metode *Design Thinking* merupakan sebuah cara berpikir yang berpusat pada manusia. Metode *Design Thinking* diciptakan oleh David Kalley (Universitas Stanford, California) dan dikembangkan oleh IDEO

Principal (Konsultan Desain), di mana alur dan tahapannya meliputi: *Empathy – Define – Ideate – Prototype – Test*. Dengan pendekatan ini, ide dikuatkan dengan empati yang berbasis pengguna dilanjutkan dengan serangkaian ujicoba dan perbaikan sebelum betul-betul diaplikasikan. *Design Thinking* dikombinasikan dengan metode Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikenal dengan 5D: *Drum-Up, Diagnose, Design, Deliver, Display*. Metode ini berbicara tentang membangun semangat, mendiagnosa masalah, mendesain rencana aksi, *men-deliver* dan menampilkan inovasi.

Kedua pendekatan ini kemudian oleh tim KLIK Baik digabungkan menjadi ide sederhana dengan membuat pendekatan baru yang diberi nama *Appreciative Thinking* atau pendekatan mengapresiasi. Pendekatan ini memberikan ruang kepada semua ASN apapun jabatannya untuk bisa melakukan perubahan, berinovasi sekecil apapun.

Klinik Inovasi Kesehatan juga menggunakan pendekatan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak yang menjadi mitra dalam pengembangan inovasi, seperti akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil (LSM dan Komunitas).

Siapa saja yang Didampingi KLIK Baik?

Kegiatan penguatan kapasitas, pendampingan dan asistensi pengembangan ide inovasi menysasar ASN yang tersebar di SKPD Dinas Kesehatan, 13 puskesmas, 2 buah UPTD (Pusat Penanganan Gizi Terpadu & PSC 119) juga termasuk Mitra Bidang Kesehatan di kabupaten Bantaeng.

Layanan yang diberikan KLIK Baik bagi ASN lingkup Dinas Kesehatan dan OPD lain di antaranya adalah layanan sekretariat. Bagian ini memberikan layanan asistensi, konsultasi terkait pengembangan inovasi. Selanjutnya ada layanan pelatihan dan pembinaan. KLIK Baik melaksanakan pelatihan dan pembinaan yang melayani 13 puskesmas dan 2 UPTD (Gizi dan Brigade Siaga Bencana) serta OPD lain yang membutuhkan. Terdapat pula layanan asistensi dan konsultasi. Bagi staf puskesmas yang memiliki ide inovasi tapi sulit mengembangkannya dapat diberikan konsultasi. Jika ada yang membutuhkan asistensi terkait keikutsertaan kompetisi, layanan ini juga dapat memberikan pendampingan baik pengembangan inovasi yang sedang berjalan maupun kelengkapan dalam keikutsertaan dalam kompetisi.

Layanan yang tidak kalah pentingnya terkait dukungan untuk pertukaran pengetahuan adalah layanan media sosial. KLIK Baik memiliki tim manajemen media sosial yang terdiri dari 3 bagian yakni tim peliputan, tim pengolah hasil liputan menjadi tulisan, foto atau video dan terakhir tim pengelola sosial media baik Instagram, YouTube maupun Facebook. Harapannya melalui layanan ini semua kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disebarluaskan ke masyarakat agar mereka tahu bahwa pemerintah hadir dalam memberikan layanan publik.

Meski berada langsung di bawah Dinas Kesehatan, namun KLIK Baik terbuka untuk semua OPD yang membutuhkan dampingan atau mencari inspirasi inovasi, dapat berdiskusi dengan tim KLIK Baik. Bukan hanya dengan OPD lain di Bantaeng, bahkan dari kabupaten lain pun sudah ada beberapa yang berkunjung untuk berdiskusi dan belajar diantaranya adalah Kabupaten Takalar, Jeneponto, Sinjai, Enrekang dan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Dampak dari Kehadiran KLIK Baik?

Tentunya yang paling mudah diukur adalah peningkatan indeks inovasi daerah. Dua tahun terakhir Bantaeng berada di peringkat kabupaten yang kurang inovatif yakni urutan 100-an, tahun 2021 inovasi kesehatan berkontribusi dalam perbaikan indeks dan menjadi urutan 48. Di tahun 2022 ini harapannya Bantaeng bisa masuk 10 besar.

Beberapa tahun terakhir, Inovasi pada bidang kesehatan di Kabupaten Bantaeng terbilang cukup berhasil memberi kebanggaan dan mengharumkan nama daerah di ajang Provinsi hingga tingkat Nasional, contohnya Inovasi Brigade Siaga Bencana, Terminal Darah, dan baru-baru ini Bendera SASKIA yang berhasil menembus Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Kemenpan RB tahun 2020.

Bantaeng menjadi salah satu kabupaten yang paling banyak mengikutkan inovasinya dalam ajang-ajang kompetisi pelayanan publik baik provinsi maupun nasional. Ada banyak piagam penghargaan yang memenuhi dinding KLIK Baik yang menjadi inspirasi bagi para ASN untuk juga berinovasi. Dalam perjalanannya di usia lebih dari setahun masih banyak hal yang ingin dilakukan KLIK Baik, namun apa yang sudah dicapai selama 1 tahun ini sudah cukup membanggakan. Pemerintah Bantaeng percaya inovasi bisa mempercepat pencapaian visi misi karena dibutuhkan gerakan, terobosan yang tidak biasa terlebih di masa pandemi ini.

Apa Mimpi yang Ingin Diwujudkan KLIK Baik?

Karena mimpi lah KLIK Baik ada, karena mimpi besar dinas kesehatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga KLIK Baik ini ada. Dalam perbincangan dengan Rahman Ramlan ia menitip harap kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan “kita sudah punya contoh satu model pendampingan inovasi kolaboratif di Bantaeng, ini sangat bagus untuk direplikasi di setiap institusi kesehatan provinsi Sulawesi Selatan”. Ia bahkan mengusulkan untuk membuat satu forum inspirasi inovasi kesehatan dimana KLIK Baik dapat menjadi motor penggerak untuk *sharing* pengetahuan bagaimana meningkatkan capaian layanan kesehatan dengan inovasi kolaboratif.

Di Bantaeng sendiri mulai didorong adanya klinik-klinik inovasi seperti KLIK Baik di masing-masing SKPD yang langsung memberikan layanan dasar seperti di sekretariat daerah, Bappeda sebagai bengkel inovasi daerah dan OPD layanan lainnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih detail mengenai praktik baik ini dapat menghubungi:

Abdul Rahman Ramlan

Email: rahmanramlan74@gmail.com/institutebonthain@gmail.com

DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**



Bertani dengan SMS di Sikka, NTT

Seorang petani muda asal Desa Kloangpopot, Kabupaten Sikka - Nusa Tenggara Timur (NTT), Yance Maring punya cara tersendiri mengolah lahan pertanian dengan menggunakan irigasi tetes yang dioperasikan melalui *smartphone*.



Si Baso, Penyelamat Generasi Muda dari Bahaya Rokok

Dinas Kesehatan Kota Makassar mencatat pada tahun 2017, dari data 63.301 siswa, terdapat sejumlah 6.382 anak berusia dibawah 18 Tahun yang merokok, atau mencapai 10,5% diatas angka nasional yaitu 9,2%.

Merespons hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Makassar menggagas Si BASO (Siswa Bebas Rokok) Apa itu Si Baso dan mampukah Si BASO menurunkan angka perokok remaja di Kota Makassar? Mari ikuti diskusi kami bersama Drg Adi Novrisa, M.Tr Adm Kes. (Inovator Si BASO/Kasie PTM dan Keswa Dinkes Kota Makassar).



Perempuan Humba

Sumba dengan berbagai keindahan pantai, bukit, padang, tarian, ritual, dan budaya dan berbagai aktivitas, ritual masyarakat menjadi daya tarik negeri yang dikenal juga dengan nama negeri Marapu ini.

Namun di balik keindahannya, Sumba juga menyembunyikan banyak hal yang membuat hati menjadi gelisah. Misalnya angka perdagangan manusia, beberapa kejadian kekerasan seksual masih marak terjadi, budaya yang semakin tergerus.

Bagi seorang Diana Debi Timoria, menjadi perempuan yang lahir dari rahim perempuan Sumba, menuntunnya pada satu bentuk pengorbanan yang menjadikan anak muda yang selalu bangga sekaligus gelisah.

Apa yang dilakukan oleh Diana bersama Komunitas Solidaritas Perempuan Dan Anak (SOPAN) untuk menjaga dan merawat masa depan Sumba?

Artikel

Studi Tegaskan Masifnya Dampak Orang Tua dalam Pembelajaran Anak: Kita Harus Bangun Terus Peran Mereka Selepas Pandemi

COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh “memaksa” orang tua mengemban beban raksasa mendampingi anaknya belajar di rumah, meskipun dengan berbagai tantangan.

Kajian dari pemerintah Jakarta bersama Abdul Latif Jameel *Poverty Action Lab* Asia Tenggara (J-PAL SEA), misalnya, menemukan orang tua kesulitan memandu anak mereka fokus belajar – terutama untuk siswa kelas 1-3 di sekolah dasar (SD). Tantangan ini lebih besar lagi pada keluarga miskin karena minimnya akses pada materi, gawai, dan sambungan internet.

Hal di atas juga jadi alasan pemerintah mendorong sekolah di seluruh Indonesia untuk kembali menggelar tatap muka.

- <https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/studi-tegaskan-masifnya-dampak-orang-tua-dalam-pembelajaran-anak-kita-harus>

Referensi

Kolaborasi BAZNAS dan Pokja PKP Kabupaten Barru dalam Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi



Pemanfaatan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia, belum banyak terjadi. Dalam catatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, sebagaimana termuat dalam buku Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman (BAZNAS Pusat, 2020), baru terdapat 17 BAZNAS di 17 kabupaten/ kota yang mendukung pembangunan air minum dan sanitasi. Jumlah ini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan keberadaan 34 BAZNAS di tingkat provinsi dan 463 BAZNAS kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

- <https://www.batukarinfo.com/referensi/kolaborasi-baznas-dan-pokja-pkp-kabupaten-barru-dalam-penyediaan-sarana-air-minum-dan>

Peluang Terbaru

Beasiswa Studi Singkat Australia Awards tentang Peran Pemerintah dan OPD dalam Implementasi Reformasi Kebijakan untuk Pembangunan yang Inklusif

Apakah anda seorang pemimpin atau calon pemimpin dari Organisasi untuk Penyandang Disabilitas (OPD) atau lembaga pemerintah yang mengimplementasikan Undang-undang tentang Disabilitas? Daftar sekarang untuk Beasiswa Studi Singkat Australia Awards tentang Peran Pemerintah dan OPD dalam Implementasi Reformasi Kebijakan untuk Pembangunan yang Inklusif.

Studi singkat ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan peserta dalam memahami proses pembuatan kebijakan, termasuk bagaimana mengembangkan regulasi dan praktik yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan dan program.

- <https://www.batukarinfo.com/news/beasiswa-studi-singkat-australiaawards-tentang-peran-pemerintah-dan-opd-dalam-implementasi>